

IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) BAGI RUMAH TANGGA DI KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN

Pramesti YonifWisma

13040674107 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: pramestiyonif@yahoo.com

Tauran, S.Sos., M.Soc., Sc.

0013047602 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: tauran_unesa@yahoo.com

Abstrak

Konsumsi pangan menjadi faktor utama masyarakat untuk hidup. Dapat dikatakan pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan di suatu negara. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan strategi untuk menciptakan cadangan pangan karena hal tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu upaya pemberdayaan dalam memanfaatkan pekarangan yang ada untuk memperoleh cadangan pangan yang cukup, sehingga meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dari subjek penelitian yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Keluarga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun masih perlu diperbaiki karena adanya beberapa hal yang menjadi kendala pelaksanaan program. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi. Kejelasan komunikasi terkait Program KRPL belum jelas karena kelompok sasaran tidak diberi buku pedoman dan foto copy materi sehingga kelompok sasaran hanya menjadi pendengar tanpa menyimak penjelasan dari tenaga pendamping atau pemateri. Kualitas dan keahlian yang ada tidak sesuai dengan program yang dijalankan. Dari segi sumber daya, jumlah staf dan tenaga pendamping yang dibutuhkan masih belum memadai dan fasilitas yang masih kurang mendukung untuk penunjang pelaksanaan program KRPL. Dari variabel disposisi, tidak ada penambahan atau perekrutan staf untuk pelaksanaan Program KRPL. Implementasi yang berjalan tidak mempunyai SOP khusus mengenai Program KRPL.

Kata kunci : Implementasi, Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Abstract

Food consumption is the main cause of the community to live. It can be said that food was the basic for mankind for the continuity of his life, hence fulfill food will be the rights for everyone. In an effort to create the fulfillment of the food needs for all the people in the area, the food availability became the main target in food policy for governments in a country. The condition of food critical could make endanger of economic stability and national stability. In the event of the gap between production with food needs in a territory could be overcome with a strategy to create food reserves because it became one of the essential component of food availability . Program of Kawasan Rumah Pangan Lestari is an effort to empower in utilizing home-lots that is to obtain reserve food enough , raising diversity and quality of food consumption the community to more diverse , nutritious balanced and safe.

This research method is descriptive qualitative. Data were collected using the techniques of collecting observations, interviews, and documentation of the study subjects were determined using purposive sampling techniques.

Based on the research, the Implementation Program of Sustainable Food Home Region (KRPL) for Families in District Mojorejo Sub-district Taman Madiun City still needs to be improved because there of several thing that becomes obstacle for the implementation of the program. Its can be seen from the minimal of socialization. Clarity communication that related to the KRPL program not yet clear because the target group was'nt given the guidebook and copy of material so that the target group was only listener without heed of explanation from the the consort or material instructor. The quality and expertise is not accordance with the running programs. From the terms resources, the number of staff and assistant which needed are still insufficient and the facilities were lacking of supports for supporting the implementation of the KRPL program. From disposition variable things, there is no increase or the recruitment of staff for the implementation of KRPL program. The running of implementation have no special SOP about the KRPL program.

Key word : Implementation , Sustainable Food Home Region Program

PENDAHULUAN

Kebijakan publik mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ekonomi, politik, sosial, budaya serta pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, salah satu permasalahan penting yang dihadapi setiap negara dalam bidang ekonomi dan sosial yaitu masalah kemiskinan. Kita ketahui bersama bahwa kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi musuh terbesar dari setiap negara dan hal tersebut juga dialami di negara Indonesia. Jadi dalam hal tersebut diperlukan upaya atau strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemiskinan mempunyai dampak negatif pada bidang kesehatan yaitu terjadinya gizi buruk dan minimnya konsumsi pangan yang mengakibatkan kelaparan (Azwar, 2005).

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi yang dimana kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya konsumsi energi dan protein (KEP) dalam makanan sehari-hari. Salah satu faktor penyebab yang mengakibatkan gizi buruk yaitu minimnya asupan gizi yang baik dengan rendahnya ketersediaan cadangan pangan pada skala rumah tangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara tingkat keadaan gizi dengan konsumsi pangan.

Konsumsi pangan sangat dibutuhkan dan menjadi faktor utama masyarakat untuk hidup. Sehingga dapat dikatakan pangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang (Bulog, 2014). Dalam rangka

mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menguraikan bahwa ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Oleh karena itu, untuk memperoleh cadangan pangan yang cukup, maka pemerintah membuat satu gerakan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman yaitu melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) (<https://id.koran/republika/krpl>).

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan (P2KP) merupakan upaya implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal. Peraturan tersebut merupakan acuan untuk mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerjasama terintegrasi antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Pedoman pelaksanaan P2KP tahun 2015). Untuk keberlangsungan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Sumber Daya Lokal yang telah dimulai pada tahun 2010, maka sejak tahun 2014 program tersebut

diimplementasikan atau diwujudkan melalui 3 kegiatan besar yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Dari ketiga kegiatan program yang ada, hanya program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah merupakan bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Jadi dalam hal itu, peneliti tertarik untuk meneliti program kegiatan tersebut. Program tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan beserta Pedoman Pelaksanaan P2KP dan Pedoman Umum KRPL tahun 2015.

Program Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah kawasan pengembangan aneka tanaman, ternak (unggas), ikan/ belut secara terpadu di pekarangan, fasilitas umum milik desa, kanan kiri jalan desa. Tujuan utama dari pengembangan KRPL adalah meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan, meningkatkan kualitas gizi keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga dan menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di setiap desa. Sasaran dari program KRPL yaitu seluruh desa dan kelurahan diseluruh wilayah Indonesia melalui: pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK Desa, kelompok tani dan Dasa wisma sebagai pelaku dan anggota pekarangan minimal beranggotakan 15 orang untuk menumbuhkembangkan kebun bibit desa dan sarana penunjang lainnya (Pedoman Umum KRPL tahun 2015).

Program KRPL merupakan program dari seluruh desa dan kelurahan diseluruh wilayah. Dalam hal ini, provinsi Jawa Timur memiliki potensi sumber daya yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk pengembangan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan peternakan). Program ini perlu dikembangkan mengingat potensi pekarangan yang ada di Jawa Timur mencapai ±626.740 Ha dan luas wilayah 47.157,72 km² dengan jumlah Kepala Keluarga

sebanyak 10.385.261 KK (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tahun 2014). Salah satu Kota di Jawa Timur yang masih menerapkan dan mengembangkan program KRPL yaitu Kota Madiun. Penelitian dilakukan di Kota Madiun karena kota tersebut pada tahun 2014 dan 2015 yaitu tepat dijalankannya program KRPL telah memperoleh penghargaan Samkaryanugraha Parasamy Purnakarya Nugraha yaitu Penyelenggara Pemerintahan Daerah terbaik berdasarkan evaluasi kinerja, mencapai prestasi dan capaian kinerja yang tinggi di berbagai pelayanan publik baik fisik maupun non fisik dan meningkatkan taraf hidup dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya kesehatan, pendidikan, perekonomian, lingkungan hidup dan pariwisata (www.madiunpos.com).

Kota Madiun terdiri atas 3 kecamatan, yaitu Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Taman Kota Madiun karena lokasi ini mempunyai jumlah penduduk banyak dan memiliki luas wilayah yang besar. Adapun data yang menunjukkan hal tersebut yaitu pada tabel berikut:

Luas Wilayah (km²) dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Madiun

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²
	(km ²)	%	Jumlah	%	
Manguharjo	10,04	30,21	50.30	28,89	5.01
Taman	12,46	37,50	74.01	42,50	5.94
Kartoharjo	10,73	32,29	49.81	28,61	4.64
Kota Madiun	33,23	100,00	174.11	100,00	5.24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun, tahun 2014

Selain itu, peneliti mengambil lokasi yang bertepatan di kelurahan Mojorejo karena lokasi tersebut mempunyai kelompok wanita tani “ALAMANDA” yang mempunyai visi, misi yang jelas dan kepengurusan yang diatur dalam surat keputusan Lurah Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun nomor tahun 2014 tentang penetapan kepengurusan kelompok wanita tani “ALAMANDA”. Warga di kelurahan Mojorejo menerapkan dan mengembangkan program KRPL bersama dengan gotong royong sehingga di setiap rumah hampir semuanya yang

mempunyai pekarangan untuk ditanami tanaman pangan.

Pelaksanaan program KRPL di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapannya masih mendapatkan beberapa kendala permasalahan seperti kurangnya komunikasi yang terjalin antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program dan minimnya sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program KRPL.

Berdasarkan masalah implementasi maka penelitian menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2012:151) ada empat variabel yang paling krusial dalam implementasi kebijakan publik, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Peneliti ingin mengetahui kajian penting yang memberikan gambaran tentang Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga dengan baik. Maka dalam skripsi ini, peneliti mengangkat judul tentang **“Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun”**.

RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun?”

TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

MANFAAT

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan bagi pengembangan teori- teori administrasi Negara khususnya pada kajian tentang implementasi kebijakan publik

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa poin-poin implementasi yang mungkin perlu adanya langkah perbaikan untuk Implementasi dari Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun.

- b. Bagi Universitas negeri Surabaya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan penelitian selanjutnya khususnya yang sejenis dan tambahan refrensi guna menambah serta melengkapi kajian tentang implementasi pelaksanaan suatu program pemerintah.

- c. Bagi Mahasiswa

- 1) Dapat menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan publik sehingga dapat menambah keterampilan sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat

- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang terkait dengan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Soebarsono (dalam Suaedi dan Bintoro, 2010) bahwa kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, internasional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Dye dalam Widodo (2011:12) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi walaupun pemerintah itu diam ketika

terjadi masalah publik, hal tersebut sudah dapat dikatakan kebijakan pemerintah

Sedangkan menurut Friedrich dalam (Widodo, 2009:13) kebijakan adalah

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala bentuk tindakan yang diambil oleh pemerintah yang dikerjakan atau tidak dikerjakannya, bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi masyarakat.

2. Bentuk Kebijakan Publik

Bentuk kebijakan publik menurut Nugroho (2011:104) mengelompokkan kebijakan publik menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro (umum) adalah kebijakan publik yang mendasar dari peraturan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) adalah kebijakan publik yang mendasar dari Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah suatu kebijakan yang mengatur kebijakan diatasnya, sehingga bentuk kebijakannya berupa peraturan yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Harsono (2002:67) mengartikan implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Sedangkan implementasi kebijakan publik menurut Tachjan (2006:24) adalah Suatu aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”.

2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Unsur-unsur penting tersebut menurut Abdullah dan Smith (Tachjan, 2006:26) yaitu unsur pelaksana (implementor), adanya program yang akan dilaksanakan dan target group.

a. Pelaksana (Implementor)

Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan.

b. Program

Program yang bersifat operasional adalah program yang isinya mudah, dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Pada hakikatnya, implementasi kebijakan adalah implementasi program.

c. Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Target group merupakan kelompok sasaran dimana terdiri dari sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan

Teori George C. Edward III (Agustino, 2012: 151-154), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan.

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*), kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*).

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

c. Disposisi (*disposition*)

Disposisi merupakan keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan

d. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan orang lain dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan fokus komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana subyek yang dipilih merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami tentang Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga. Adapun subyek dalam penelitian ini, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan Kota Madiun dan Kelompok Wanita Tani "ALAMANDA"

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Letak Geografis dan Wilayah Kerja

Mojorejo adalah sebuah kelurahan di wilayah Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Mojorejo dipimpin oleh seorang lurah yang berkantor di jalan Setya Budi No. 42, kode pos 63139 Kota Madiun. Batas wilayah Kelurahan Mojorejo yaitu: sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kelurahan Klegen, sebelah Selatan dengan Kelurahan Banjarejo, sebelah Barat dengan Kelurahan Kejuron dan sebelah Timur dengan Kelurahan Kanigoro. Selain itu, daerah tersebut juga dilintasi jalur darat Surabaya-Ponorogo.

Pada tahun 2014, lurah di Kelurahan Mojorejo membuat surat keputusan tentang penetapan kepengurusan kelompok wanita "ALAMANDA" bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian di Kota Madiun, dimana peranan wanita juga menjadi penting diperlukan peningkatan kemampuan setiap kelompok wanita dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan dalam mengembangkan agrobisnis dan penguatan kelompok wanita menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Kepengurusan kelompok wanita di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun sebagai wadah kerjasama antar anggota kelompok wanita. Bersama dengan Surat Keputusan tersebut, Kelurahan Mojorejo mengadakan musyawarah pada tanggal 17 Januari 2014 dengan memperoleh suatu keputusan atau hasil yaitu: Kepengurusan (struktur organisasi) Kelompok Wanita Tani "ALAMANDA" Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun

2. Program Kawasan Rumah Pangan Lestari

Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui KRPL selama ini telah terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat baik bagi anggota kelompok wanita maupun lingkungan kawasan di

sekitarnya. Bagi pelaku anggota kelompok wanita, kegiatan ini dapat memberikan sumbangan pangan untuk dikonsumsi bagi keluarga, menghemat pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan atau gizi sehari-hari dan terjadinya diversifikasi konsumsi pangan pada rumah tangga anggota. Bagi lingkungan kawasan, kegiatan ini dapat membuat suasana asri dan lingkungan lebih nyaman.

3. Pembahasan

Fokus dalam penelitian ini adalah empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, oleh karena itu keempat variabel tersebut akan diulas satu per satu untuk menjabarkan Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Adapun ulasannya adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Variabel komunikasi yang disampaikan Edward III ini mempunyai beberapa sub variabel yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

1) Transmisi

Transmisi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain berkenaan dengan hal tersebut penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Pelaksanaan KRPL dalam penyaluran komunikasi dari level atas ke level yang paling bawah sudah cukup baik, semua informasi yang didapat segera ada tindak lanjutan. Sosialisasi Pelaksanaan Program KRPL masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi yang diberikan.

2) Kejelasan

Kejelasan yang dimaksud disini merupakan kejelasan dalam

menyampaikan informasi mengenai KRPL, baik itu berasal dari pelaksana ke pelaksana lain atau antara pelaksana ke kelompok sasaran. Kejelasan komunikasi terkait Program KRPL belum jelas karena kelompok sasaran tidak diberi buku pedoman dan foto copy materi sehingga hanya menjadi pendengar tanpa menyimak penjelasan dari tenaga pendamping atau pemateri.

3) Konsistensi

Konsistensi dapat diartikan sebagai keseragaman informasi yang disampaikan. Keseragaman artinya informasi yang disampaikan adalah sama sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Penyampaian materi atau informasi antara tenaga pendamping satu dengan yang lainnya sama sehingga kelompok sasaran tidak bingung. Pelaksana program menyampaikan segala informasi apa adanya kepada kelompok sasaran tanpa mengubah bentuk dan tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Semua informasi yang diberikan sudah sesuai dengan peraturan dan isi kebijakan yang sudah ada pada buku pedoman.

b. Sumber Daya

Implementasi suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik ketersediaan sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang ada.

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan implementasi, karena ketersediaan aktor atau pelaksana program adalah indikator yang menentukan keberhasilan proses implementasi. Pada pelaksanaan program KRPL, jumlah staf kurang sehingga tenaga pendamping kerepotan melakukan

monitoring dengan terbatasnya tenaga yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu kendala bahwa monitoring jarang dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kualitas dan keahlian yang ada tidak sesuai dengan program yang dijalankan.

2) Informasi

Informasi yang diberikan harus bersifat, lengkap, jelas dan mudah dipahami baik oleh pelaksana program dari atasannya atau kelompok sasaran. Informasi yang didapat kelompok sasaran terkait pelaksanaan program KRPL sudah cukup efektif. Setiap informasi yang didapat pelaksana program terkait program KRPL disampaikan kepada kelompok sasaran.

3) Kewenangan

Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan oleh bawahannya atau kelompok sasaran. Wewenang dalam pelaksanaan Program KRPL sudah sesuai dengan tugas dan peran semua aktor yang terlibat. Wewenang yang paling tinggi berada pada Pemerintah Pusat, karena KRPL merupakan Program Nasional.

4) Anggaran

Anggaran merupakan faktor yang membantu dalam pelaksanaan setiap program. Dalam pelaksanaan program KRPL, dana yang disediakan sudah mencukupi atau memadai. Dana yang digulirkan untuk mencukupi semua kebutuhan untuk pelaksanaan program KRPL berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. APBD Kota dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat disalurkan oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksi

masing-masing dalam mewujudkan pelaksanaan KRPL..

5) Fasilitas

Fasilitas menjadi faktor penunjang untuk keberhasilan pelaksanaan program karena dengan adanya fasilitas yang memadai, maka segala bentuk kegiatan untuk melaksanakan program akan mudah dilakukan atau berhasil. Fasilitas yang tersedia belum cukup untuk pelaksanaan Program KRPL, seperti kurangnya kebun bibit, demplot, kolam ikan dan tidak adanya sumur atau sumber air yang mengalir untuk kegiatan program.

c. Disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai sikap dan kemauan maupun komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan hingga mampu mencapai sasaran yang diinginkan.

1) Pengangkatan Birokrat

Setiap pelaksanaan program kebijakan membutuhkan pekasana program yang sesuai dengan bidangnya. Hal ini juga berkaitan pada sikap pelaksana program yang akan menimbulkan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan jika jumlah staf yang ada tidak sesuai dengan kualitas berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program KRPL tidak ada penambahan atau perekrutan staf sehingga hanya bidang pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan saja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya

2) Insentif

Penambahan insentif untuk pelaksana program merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan

memanipulasi insentif. Pada pelaksanaan program KRPL, insentif hanya diberikan kepada pendamping program saja. Karena kita ketahui bahwa pendamping program lebih mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dan melelahkan.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena adanya ketidak efisiennya struktur birokrasi.

1) *Standard Operational Procedures* (SOPs)

SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang setiap hari dilakukan sesuai standar yang sudah ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan. Pelaksanaan Proqram KRPL tidak mempunyai SOP khusus, tetapi ada SOP terkait ketersediaan Pangan.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pelaksana program KRPL sudah sesuai bidangnya masing-masing. Selama ini pelaksana mampu mengatasi kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan KRPL.

KESIMPULAN

Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Rumah Tangga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun masih belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sosialisasi. Dari segi sumber daya, jumlah tenaga yang dibutuhkan masih belum memadai dan fasilitas yang masih kurang mendukung untuk penunjang pelaksanaan program KRPL. Pada variabel Disposisi, dalam pelaksanaan Program KRPL tidak ada penambahan atau perekrutan staf. Hal

tersebut menyebabkan sosialisasi menjadi kurang karena jika tenaga yang ada minim maka akan berpengaruh pada kegiatan sosialisasi atau monitoring. Struktur Birokrasi, pelaksanaan Program KRPL sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan aktor yang terlibat menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Pelaksanaan Proqram KRPL tidak mempunyai SOP khusus, tetapi ada SOP terkait ketersediaan Pangan.

SARAN

Dari hasil kesimpulan Implementasi kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) bagi Keluarga di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, dapan diperoleh saran yang membangun dari peneliti, yaitu:

1. Sosialisasi mengenai KRPL perlu untuk dijalankan dan ditingkatkan lagi sehingga kelompok sasaran mendapatkan informasi atau wawasan yang lebih banyak
2. Buku pedoman seharusnya dibagikan kepada kelompok sasaran dan jika sosialisasi dijalankan sebaiknya materi yang menjadi diskusi digandakan
3. Perlu adanya penambahan staf atau tenaga penting agar pelaksanaan Program KRPL dapat berjalan dengan baik
4. Kualitas dan keahlian pelaksana program lebih diperhatikan lagi, perlu mengikutsertakan dinas pertanian dan dinas perikanan dalam menjalankan Program KRPL.
5. Fasilitas yang diberikan harus ditingkatkan lagi sehingga semua sarana dan prasarana pelaksanaan Program KRPL dapat terpenuhi

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.
- Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W lemlit UNPAD.
- Widodo, Djoko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Pedoman pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan (P2KP) tahun 2015